

**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN  
PENGANTI DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pati)**

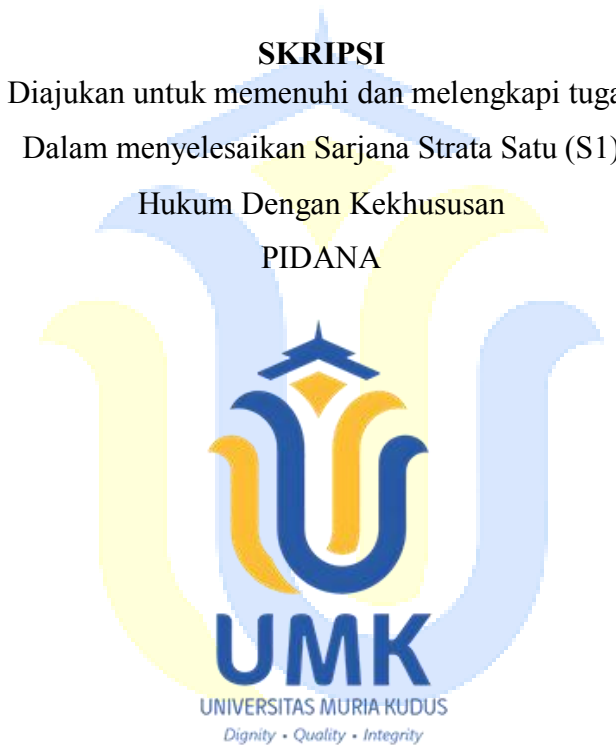
**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

PIDANA



Oleh:

**ALIVIA NURUL HIDAYAH**

NIM. 2018-20-149

---

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI  
TANPA IZIN EDAR

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pati)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum

Dengan Kekhususan

PIDANA

Oleh:

ALIVIA NURUL HIDAYAH  
201820149

Kudus, 01 September 2023

Disetujui:

Pembimbing I,



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

NIDN.0613046101

Pembimbing II,



Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum.

NIDN.0625038303

Mengetahui:

UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
Dekan Fakultas Hukum UMK  
  
Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.  
NIDN.0613046101

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIVIA NURUL HIDAYAH

NIM : 201820149

Alamat : Sekarjalak Rt 04 Rw 02, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah

Judul Skripsi : DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN  
PENGANTI DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pati)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 01 September 2023  
Yang membuat pernyataan,



METERA  
TEMPEL  
3000  
66825FAKX546728807

Alivia Nurul Hidayah

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Dignity • Quality • Integrity

## HALAMAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap”

(Q.S Al-Insyirah:6-8)

Saya persembahkan untuk:

1. Orang Tua tercinta
2. Kakakku tersayang
3. Para Dosen pembimbing beserta Bapak dan Ibu Dosen FH UMK
4. Teman-teman fakultas Hukum UMK Angkatan 2018

UMK  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
*Dignity • Quality • Integrity*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pati)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Pada penyusunan skripsi ini penulis melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II, sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Ibu Dian Herminasari, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Pati, yang telah bersedia menjadi responden dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Krismiyanto selaku Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati, yang telah bersedia menjadi responden dalam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh dosen pengajar dan staff Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu, sarana dan prasarana.
  7. Orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
  8. Fafirrotin Nurul Hidayati kakak saya tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
  9. Saka Murti Dwi Sutrisna, S.H., M.H., kakak saya yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
  10. Rekan-rekan teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus angkatan 2018 yang telah memberi motivasi dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
  11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
- Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 01 September 2023



Alivia Nurul Hidayah

UMK  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
Dignity • Quality • Integrity

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Denda Dalam Perkara Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pati)” secara umum bertujuan: 1) mengetahui alasan terjadinya disparitas penjatuhan pidana kurungan pengganti denda; 2) mengetahui kecenderungan terpidana dalam memilih antara pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda dalam perkara tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis melalui metode pengumpulan data studi pustaka sebagai data utama dan wawancara sebagai data pendukung. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan terjadinya disparitas penjatuhan pidana kurungan pengganti denda pada putusan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar (studi putusan Pengadilan Negeri Pati nomor 7/Pid.Sus/2021/PN.Pti dan nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Pti) dikarenakan adanya beberapa faktor penyebab, yaitu: Undang-Undang, karena pada Pasal 196 Jo Pasal 98 UU Kesehatan, membuka peluang hakim untuk menjatuhkan pidana penjara minimal 1 (satu) hari dan maksimal 10 (sepuluh) tahun, pidana denda minimal Rp.1,- (satu rupiah) dan maksimal Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan pada pidana kurungan pengganti minimal 1 (satu) hari kurungan paling lama enam bulan sesuai dalam Pasal 30 ayat (3) KUHP. Apabila ada pemberatan denda, disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama menjadi delapan bulan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (5) KUHP. *Kedua*, Indonesia tidak menganut pada asas *The Binding Force of Precedent*. Sehingga hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sama. *Ketiga*, kebebasan hakim untuk memberikan putusan pengadilan terhadap perkara yang diadili, hal itu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 24 ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 183 KUHP. Kecenderungan terpidana dalam putusan di atas lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti daripada membayar pidana denda.

Kata Kunci: Disparitas Pidana, Kurungan Pengganti Denda, Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar.

## **ABSTRACT**

*The research with the title Disparity of Sentences of Imprisonment in lieu of Fines in Criminal Cases of Distribution of Pharmaceutical Preparations Without a Distribution Permit (Study of Decisions of the Pati District Court)" generally aims to: 1) find out the reasons for the occurrence of disparities in imposition of imprisonment in lieu of fines; 2) knowing the tendency of convicts to choose between fines or imprisonment in lieu of fines in criminal cases involving distribution of pharmaceutical preparations without a distribution permit.*

*The research method used is normative law. Research specifications in this study used analytical descriptive through the library study data collection method as the main data and interviews as supporting data. Furthermore, the data were analyzed qualitatively.*

*Based on the results of the research, it is known that the reason for the disparity in the imposition of imprisonment in lieu of fines is in the decision of the crime of distribution of pharmaceutical preparations without a distribution permit (study of the Pati District Court decision number 7/Pid.Sus/2021/PN.Pti and number 12/Pid.Sus/2021 /PN.Pti) due to several causal factors, namely: Law, because in article 196 Jo article 98 of the Health Law, it opens the opportunity for judges to impose a minimum prison sentence of 1 (one) day and a maximum of 10 (ten) years, a fine a minimum of Rp.1,- (one rupiah) and a maximum of Rp.1,000,000,000.00 (one billion rupiah), and for a substitute imprisonment of at least 1 (one) day of imprisonment for a maximum of six months in accordance with Article 30 paragraph (3) of the Criminal Code. If there is an aggravation of fines, caused by concurrence or repetition or because of the provisions of Articles 52 and 52a, then the replacement confinement is no longer than eight months according to the provisions of Article 30 paragraph (5) of the Criminal Code. Second, Indonesia does not adhere to the principle of The Binding Force of Precedent. So that the judge is not obliged to follow the decision of the previous judge in the same case. Third, the freedom of judges to give court decisions on cases being tried, this is in accordance with the provisions in Article 24 paragraph (1) of the third amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 1 point 1 of Law No. 48 of 2009, and Article 183 of the Criminal Procedure Code. The tendency of convicts in the decision above is to prefer serving a substitute imprisonment rather than paying a fine.*

*Keywords: Criminal Disparity, Confinement in lieu of Fines, Distribution of Pharmaceutical Preparations Without a Distribution Permit.*

*Dignity • Quality • Integrity*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	14
E. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
1. Teori Keadilan .....	17
2. Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar .....	19
3. Pidana dan Pemidanaan .....	24
4. Disparitas Pidana .....	29
5. Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda.....	32

6. Pertimbangan Hakim .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Metode Pendekatan .....	44
B. Spesifikasi Penelitian.....	46
C. Metode Pengumpulan Data .....	47
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....	49
E. Metode Analisis Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Alasan Terjadinya Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Denda Pada Putusan Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 7/Pid.Sus/2021/PN.Pti dan No. 12/Pid.Sus/2021/PN.Pti) .....	51
B. Kecenderungan Terpidana Dalam Memilih Antara Pidana Denda Atau Pidana Kurungan Pengganti Denda Dalam Putusan Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pati No. 7/Pid.Sus/2021/PN.Pti dan No. 12/Pid.Sus/2021/PN.Pti) .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Putusan tahun 2020-2022 di Pengadilan Negeri Pati

Tabel 1.2 Perbandingan 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Pati

Tabel 2.1 Undang-Undang yang mengatur pidana kurungan pengganti denda

Tabel 4.1 Putusan Pengadilan Negeri Pati tahun 2020-2022

